

PERKEMBANGAN ILMU PERBANDINGAN ADMINISTRASI PUBLIK

Dinda Tri Hapsari¹, Nur Al'fiyah², Nindya Kartika Kusmayati³
dindatrihap2124@gmail.com¹, alfialfiyah018@gmail.com²,
nindya.kusmayati@stiemahardhika.ac.id³
STIE Mahardhika Surabaya

ABSTRAK

Administrasi publik perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang layanan publik agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang kompleks dan memberikan layanan yang efisien. Birokrasi masih sangat kabur dalam hal memahami pelayanan publik. Salah satu interpretasi dari istilah "administrasi" adalah pengaturan metodelis tugas dan operasi di dalam organisasi yang berkisar dalam kompleksitas dan jenis. Dalam upaya untuk mempromosikan penerapannya dalam berbagai studi berikutnya untuk meningkatkan validitas ilmiah dan relevansi kebijakan ilmu administrasi publik, artikel ini merinci evolusi konsep partisipasi dalam studi ilmu administrasi publik sebagai hasil dari penulisan literatur. Sebagai bagian dari fokus kajian ilmu administrasi publik, konsep partisipasi terus berubah dan berkembang seiring dengan perubahan orientasi dan perkembangan paradigma ilmu administrasi publik itu sendiri.

Kata Kunci: Perkembangan, Administrasi Public, Ilmu Perbandingan.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan dinamika kompleks yang melanda berbagai negara di seluruh dunia, administrasi publik menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Perubahan-perubahan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi telah memberikan tantangan baru bagi administrasi publik dalam menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks dan multidimensional. Sebagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan membandingkan berbagai sistem administrasi publik di berbagai negara, ilmu perbandingan administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan kerangka kerja konseptual untuk memahami berbagai fenomena administratif yang terjadi. Administrasi adalah kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan agenda dan lain sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (Salasiah & Sudiyarti, 2024).

Dalam konteks ini, perkembangan ilmu perbandingan administrasi publik menjadi sangat relevan untuk dipelajari dan dipahami. Seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan global, ilmu ini terus mengalami perkembangan yang signifikan. Penelitian-penelitian terbaru, teori-teori baru, dan pendekatan-pendekatan inovatif terus bermunculan untuk menjawab tantangan-tantangan baru dalam administrasi publik. Melalui pendekatan perbandingan, ilmu ini tidak hanya memungkinkan analisis terhadap kebijakan dan praktik administratif di satu negara, tetapi juga memfasilitasi pemahaman terhadap perbandingan antarnegara yang mendalam.

Administrasi publik, atau yang sering disebut Administrasi Negara di Indonesia, merupakan bidang yang sangat vital dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan. Konsep dan definisi mengenai administrasi publik telah menjadi subjek perdebatan yang intens di kalangan para ahli, yang menghasilkan gambaran yang beragam tentang sifat, ruang lingkup, dan peranannya dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik. Secara umum, administrasi publik dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan umum.

Di Indonesia, administrasi publik menjadi tulang punggung dari berbagai kegiatan

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Peran administrasi publik tidak hanya terbatas pada pelaksanaan rutin tugas-tugas administratif, tetapi juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sumber daya lainnya dengan efisien dan efektif. Selain itu, administrasi publik juga berkaitan erat dengan penyusunan kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta evaluasi dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Dalam penelitian yang disajikan, beberapa temuan penting muncul dari analisis berbagai studi. Pertama, reformasi birokrasi telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kinerja administrasi publik di Indonesia. Reformasi ini terutama menitikberatkan pada dua dimensi utama, yaitu keorganisasian dan manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur. Dengan memperbaiki struktur organisasi dan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan birokrasi dapat beroperasi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Kedua, nilai-nilai etika memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan administrasi publik. Penelitian menyoroti bahwa penerapan nilai-nilai etika tidak hanya memengaruhi perilaku individu-administrator publik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Dengan memegang teguh nilai-nilai etika, diharapkan administrator publik dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas, profesionalisme, dan keadilan, yang pada gilirannya berkontribusi pada terwujudnya *good governance*.

Ketiga, administrasi publik dipandang sebagai seni ilmiah yang memanfaatkan prinsip-prinsip yang telah teruji untuk mengelola proses-proses administratif guna mengatur, melayani, dan melindungi kepentingan umum. Dalam konteks ini, administrasi publik harus memahami realitas yang ada di masyarakat dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya. Administrasi publik juga perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan perannya secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Kasim (1993), administrasi publik adalah salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan yang mencakup proses, organisasi, dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam implementasi peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan peradilan. Dalam pandangan ini, administrasi publik secara implisit terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik, mulai dari perumusan hingga implementasi. Namun, pandangan ini tidak selalu konsisten. Ellwein, Hesse, dan Peter (dalam Knill, 2001) menyatakan keyakinan bahwa administrasi publik kurang memiliki fleksibilitas dan kebijaksanaan relatif dalam memberlakukan undang-undang. Mereka lebih melihat administrasi publik sebagai alat untuk menerapkan hukum daripada sebagai sarana merumuskan kebijakan baru.

Definisi lain dari Henry (1989) menggambarkan administrasi publik sebagai sinergi antara teori dan praktik birokrasi publik, sementara Hughes (1994) menekankan pada peran pegawai negeri dalam melayani publik dan menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Dalam memahami konsep administrasi publik, Bailey (dalam Henry, 1989) mengidentifikasi empat jenis teori yang relevan. Teori deskriptif mendeskripsikan struktur hirarkis dan hubungan dengan lingkungan tugasnya, sedangkan teori normatif menyoroti tujuan nilai yang harus dikerjakan oleh praktisi administrasi publik. Teori asumptif menyoroti pemahaman yang lebih dalam mengenai realitas administratif, sementara teori instrumental menekankan pada peningkatan pemahaman teknik manajerial bagi efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan publik.

Dengan berbagai pandangan ini sebagai latar belakang, penulisan artikel ini bertujuan

untuk membahas perkembangan ilmu perbandingan administrasi publik, khususnya dalam konteks Indonesia. Diskusi akan mencakup perbandingan kebijakan publik antarnegara, serta perkembangan administrasi publik di Indonesia dari masa lampau hingga saat ini. Melalui penelusuran ini, diharapkan akan terungkap bagaimana perkembangan ini memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.

Dalam bab pendahuluan ini, akan dibahas mengenai pentingnya memahami perkembangan ilmu perbandingan administrasi publik dalam konteks globalisasi dan dinamika zaman. Selain itu, akan diuraikan pula mengenai latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup dari penelitian ini. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai relevansi dan kebutuhan untuk terus memperkaya pemahaman kita terhadap ilmu perbandingan administrasi publik. Sehingga, dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik administratif yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian literatur. Metode penelitian literatur merupakan pendekatan yang sangat penting dalam menghasilkan gagasan dan pemahaman yang mendalam mengenai keterlibatan dalam administrasi publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan menganalisis berbagai perspektif, teori, temuan, dan praktik yang telah ada sebelumnya, serta menyusunnya menjadi kerangka pemikiran yang kokoh untuk penelitian yang sedang dilakukan. Penyusunan literatur ilmiah melibatkan beberapa tahapan proses diantaranya adalah menemukan literatur yang relevan, melakukan evaluasi sumber literatur review, melakukan identifikasi tema dan kesenjangan antara teori dengan kondisi lapangan jika ada, membuat struktur garis besardan menyusun ulasan literatur review (Cahyono et al., 2019).

Dalam penelitian ini, penggunaan metode penelitian literatur didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan terkini mengenai peran keterlibatan dalam administrasi publik. Untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah telah dilakukan: Pertama yaitu, pemilihan sumber data perpustakaan. Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber data perpustakaan yang relevan dengan tema penelitian. Ini termasuk buku-buku yang memiliki keterkaitan langsung dengan bidang administrasi publik dan partisipasi, studi sebelumnya yang telah menyoroti konsep keterlibatan sebagai kunci penting dalam administrasi publik, serta artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional yang secara khusus memfokuskan pada isu-isu administrasi publik.

Kedua yaitu analisis terhadap sumber data. Setelah sumber data telah terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis yang cermat terhadap konten dari setiap sumber tersebut. Ini melibatkan pembacaan secara rinci terhadap buku, studi, dan artikel yang relevan untuk mengekstrak informasi penting, temuan, dan argumen yang berkaitan dengan keterlibatan dalam administrasi publik. Proses ini memerlukan pembacaan yang teliti dan cermat terhadap buku, studi, artikel, dan karya sastra lainnya yang terkait dengan tema penelitian, yaitu keterlibatan dalam administrasi publik. Pembacaan secara rinci ini bertujuan untuk mengekstrak informasi penting, temuan, dan argumen yang berkaitan dengan keterlibatan dalam administrasi publik. Peneliti harus memahami dengan baik substansi dari setiap sumber data yang ada, mencatat konsep-konsep kunci, temuan-temuan penting, serta argumen-argumen yang diajukan oleh penulis. Selain itu, peneliti juga perlu memperhatikan konteks dan metodologi yang digunakan dalam penelitian atau karya tersebut.

Ketiga yaitu mengkaji karya sastra terkait. Selain sumber-sumber akademis, penelitian juga merujuk pada karya sastra dan tulisan lainnya yang menggali gagasan dan praktik partisipasi di berbagai negara, termasuk analisis kontekstual tentang Indonesia. Ini penting untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai fenomena partisipasi dalam administrasi publik, serta memahami perbedaan dan kesamaan konteks antar-negara. Setelah informasi dari berbagai sumber telah dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyusunnya menjadi kerangka pemikiran yang kokoh. Ini melibatkan identifikasi pola, temuan umum, konflik, dan kesenjangan dalam literatur yang relevan, serta merumuskan argumen atau hipotesis yang akan diuji dalam penelitian lebih lanjut.

Metode penelitian literatur ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan secara lebih mendalam. Pertama, keterbatasan akses terhadap literatur tertentu atau sumber data dapat menjadi hambatan dalam menyusun kerangka pemikiran yang komprehensif. Terkadang, beberapa sumber literatur mungkin tidak tersedia secara daring atau memiliki akses yang terbatas, terutama jika topik penelitian merupakan bidang yang masih terus berkembang atau memiliki keterkaitan dengan data rahasia atau terbatas dari lembaga pemerintah. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kedalaman dan keberagaman analisis yang dilakukan, serta potensinya dalam mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau perspektif yang belum dieksplorasi.

Kedua, keterbatasan waktu menjadi faktor penting dalam penelitian literatur. Dalam menyelidiki berbagai sumber literatur yang relevan dan memperoleh pemahaman yang mendalam, peneliti sering kali dihadapkan pada kendala waktu yang terbatas. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan penelitian hanya dapat menjangkau sebagian kecil dari literatur yang tersedia, yang kemudian berpotensi menghasilkan kerangka pemikiran yang kurang komprehensif atau analisis yang belum memadai.

Ketiga, potensi bias dalam seleksi literatur dapat memengaruhi objektivitas dan keandalan hasil penelitian. Meskipun upaya dilakukan untuk memilih sumber literatur yang representatif dan relevan, terdapat risiko bahwa preferensi atau kecenderungan peneliti dapat mempengaruhi proses seleksi. Bias ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kecenderungan untuk memilih literatur yang sejalan dengan sudut pandang atau hipotesis penelitian tertentu, serta pengabaian terhadap literatur yang mungkin memberikan kontribusi pandangan alternatif atau divergensi teoritis. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan dengan hati-hati potensi bias ini dan melakukan langkah-langkah untuk memitigasinya, seperti melakukan seleksi literatur secara sistematis dan transparan serta mempertimbangkan multiple perspektif dalam analisis.

Dengan demikian, metode penelitian literatur digunakan sebagai landasan yang kuat untuk membangun pemahaman yang mendalam mengenai keterlibatan dalam administrasi publik, yang pada gilirannya akan membantu dalam menyusun kerangka konseptual dan metodologis untuk penelitian lebih lanjut. Metode penelitian literatur digunakan untuk menghasilkan gagasan keterlibatan dalam administrasi publik. Karena itu, untuk memastikan bahwa hasilnya selengkap dan semutakhir mungkin, penelitian ini mengacu pada berbagai sumber data perpustakaan, seperti buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian, studi administrasi publik sebelumnya yang menekankan partisipasi sebagai konsep kunci, artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional yang berfokus pada administrasi publik, dan karya sastra lainnya yang mengeksplorasi gagasan dan praktik partisipasi di seluruh dunia, termasuk analisis kontekstual tentang Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pembahasan yang terungkap menegaskan kompleksitas dan vitalitas administrasi publik dalam konteks perkembangan global dan teknologi yang semakin dinamis. Administrasi publik, sebagai bidang interdisipliner, telah memperoleh kontribusi yang signifikan dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, hukum, sosiologi, manajemen, dan ekonomi. Interaksi antara disiplin-disiplin ini memperkaya pemahaman tentang dinamika kekuasaan dalam pemerintahan, pembentukan kerangka hukum yang mengatur kegiatan administratif, struktur sosial di mana administrasi publik beroperasi, serta teknik dan prinsip manajemen yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ilmu politik memberikan wawasan yang mendalam tentang proses pembuatan keputusan politik dan peran aktor politik dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi administrasi publik. Pemahaman tentang negosiasi politik antarpantai, dinamika hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta landasan politik dari kebijakan yang diterapkan, menjadi krusial dalam konteks administrasi publik. Di samping itu, kontribusi dari ilmu hukum menetapkan kerangka hukum yang mengatur kegiatan administratif pemerintah, memastikan prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan keadilan diikuti oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, ilmu sosiologi memberikan pemahaman tentang struktur sosial dan interaksi antarindividu dalam masyarakat, membentuk konteks sosial di mana administrasi publik beroperasi. Ini penting untuk memahami dinamika dalam organisasi pemerintah dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Di sisi lain, kontribusi dari ilmu manajemen memberikan pemahaman tentang teknik dan prinsip manajemen yang dapat diterapkan dalam konteks administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, ilmu ekonomi memberikan pemahaman tentang alokasi sumber daya dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik, serta dampak kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi menjadi krusial karena efisiensi penggunaan sumber daya merupakan tujuan utama administrasi publik dalam menyediakan pelayanan publik berkualitas dengan anggaran yang terbatas. Dampak teknologi informasi dan digital juga menjadi signifikan dalam perkembangan administrasi publik, dengan memperkenalkan konsep e-government atau pemerintahan elektronik, yang mengubah paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, penting untuk memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh administrasi publik dalam menghadapi perubahan global dan Revolusi Industri 4.0. Integrasi teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia yang berkualitas, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi dinamika perubahan yang semakin cepat. Reformasi birokrasi juga menjadi fokus penting dalam administrasi publik, dengan upaya menciptakan birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), seperti yang telah dilakukan di Indonesia sejak tahun 1998. Reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas administrasi publik. Reformasi tersebut berfokus pada dua dimensi utama, yaitu dimensi keorganisasian dan dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Di Indonesia, reformasi birokrasi dimulai sejak tahun 1998 dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Selain itu, nilai-nilai etika memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi publik. Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika menjadi pedoman bagi para administrator publik dalam menjalankan tugas mereka untuk melayani masyarakat.

Penerapan nilai-nilai etika tidak hanya berdampak pada individu-administrator publik itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas dalam rangka mewujudkan good governance. Lalu, administrasi publik dipandang sebagai seni ilmiah yang memanfaatkan prinsip-prinsip yang telah teruji untuk mengelola proses-proses administratif guna mengatur, melayani, dan melindungi kepentingan umum. Hal ini menekankan pentingnya memahami realitas yang ada di masyarakat dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai landasan dalam menjalankan tugas administratif.

Kemudian, proses administrasi publik mencakup pelayanan publik sebagai salah satu dimensinya. Pentingnya pelayanan publik dalam administrasi publik sangat terkait dengan kesejahteraan warga negara. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, maka akan semakin tercapainya welfare state dan semakin baiknya administrasi publik sebuah negara. Dengan begitu, hasil dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik membutuhkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, penerapan nilai-nilai etika yang tinggi, pemahaman yang baik tentang realitas masyarakat, serta pelayanan publik yang berkualitas sebagai landasan untuk mencapai good governance dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan menjadi penting untuk meningkatkan legitimasi kebijakan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kajian-kajian yang telah dilakukan, diperkuat pemahaman tentang kompleksitas administrasi publik dan pentingnya adaptasi terhadap perubahan dinamika global untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian, hasil pembahasan tersebut memberikan landasan yang kuat untuk mengoptimalkan administrasi publik dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Pembahasan

Perkembangan ilmu administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh konsep dan teori administrasi itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai disiplin ilmu lainnya. Di antara disiplin ilmu yang memberikan kontribusi penting adalah ilmu politik, hukum, sosiologi, manajemen, dan ekonomi. Keterlibatan beragam disiplin ilmu ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang administrasi publik dan memperkaya kerangka kerja konseptual yang digunakan dalam analisis administratif. Oleh karena itu, konsep administrasi publik sebagai suatu pemikiran yang dipelajari secara interdisiplin minimal mencakup aspek, yaitu, Organisasi dan manajemen; Politik; Hukum

Pertama, ilmu politik memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kekuasaan di dalam pemerintahan, termasuk proses pembuatan keputusan politik dan peran aktor politik dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi administrasi publik. Sebagai contoh, pemahaman mengenai proses pembuatan undang-undang, negosiasi politik antarpartai, serta dinamika hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat relevan dalam konteks administrasi publik. Pengetahuan tentang hal ini memungkinkan para administrator publik untuk memahami landasan politik dari kebijakan yang mereka terapkan, serta memprediksi implikasi politik dari keputusan administratif yang diambil.

Sementara itu, kontribusi dari ilmu hukum menjadi sangat penting dalam konteks administrasi publik karena menyangkut kerangka hukum yang mengatur kegiatan administratif pemerintah. Ilmu hukum memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan keadilan yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Ini termasuk pemahaman tentang prosedur hukum yang harus diikuti dalam pengambilan keputusan administratif, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif, serta hak dan kewajiban warga negara dalam

berinteraksi dengan pemerintah. Keberadaan kerangka hukum yang jelas dan kuat memberikan jaminan terhadap pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Selain ilmu politik dan hukum, administrasi publik juga dipengaruhi oleh kontribusi dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi, manajemen, dan ekonomi. Misalnya, sosiologi memberikan pemahaman tentang struktur sosial dan interaksi antarindividu dalam masyarakat yang membentuk konteks sosial di mana administrasi publik beroperasi. Hal ini penting untuk memahami dinamika dalam organisasi pemerintah dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Di sisi lain, kontribusi dari ilmu manajemen memberikan pemahaman tentang teknik dan prinsip manajemen yang dapat diterapkan dalam konteks administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan ilmu ekonomi memberikan pemahaman tentang alokasi sumber daya dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik, serta dampak kebijakan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

Selanjutnya, pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi memberikan wawasan tentang alokasi sumber daya publik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dampak kebijakan ekonomi terhadap administrasi publik. Ini menjadi penting karena efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu tujuan utama administrasi publik dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dengan anggaran yang terbatas. Selain itu, peran teknologi informasi dan digital juga memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan administrasi publik. Pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat, dengan memperkenalkan konsep e-government atau pemerintahan elektronik. Hal ini mengubah paradigma dalam administrasi publik, memungkinkan pemerintah untuk menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut penelitian dari Johanes (2018), penelitian tersebut membahas tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh Administrasi Publik di Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Melalui penelitian ini, disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan publik. Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, organisasi publik harus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat dan kompleks untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan publik. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan juga penting untuk meningkatkan legitimasi kebijakan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, artikel tersebut menekankan pentingnya integrasi teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia yang berkualitas, dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat Administrasi Publik dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0.

Berdasarkan penelitian (Julianti, n.d.), globalisasi memiliki dampak yang signifikan pada bidang administrasi publik, khususnya dalam konteks internasionalisasi. Globalisasi membawa perubahan dalam hubungan lintas batas antara organisasi dan komunitas di luar batas yurisdiksi nasional, serta memfasilitasi transaksi keuangan, komunikasi, perdagangan, dan budaya. Dampak positif dari globalisasi termasuk masuknya bantuan dari organisasi internasional, NGO, dan INGO, yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini, yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi kasus, memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak globalisasi dalam konteks administrasi publik. Oleh karena itu, penting bagi praktisi administrasi publik untuk memahami dan mengadaptasi diri terhadap dinamika globalisasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Metode penilaian yang digunakan oleh organisasi publik yang bukan untuk mencari keuntungan dan metode oleh perusahaan swasta yang termotivasi oleh laba adalah dua cara lebih lanjut bahwa administrasi publik dan manajemen berbeda satu sama lain. Sebagai bagian dari paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi, salah satu konsep pertama tentang konsep partisipasi menjadi dikenal dalam teori organisasi perilaku. Misalnya, Keith Davis dan Newstrom (1972) memperkenalkan gagasan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan administratif di perusahaan. Perkembangan ketersediaan data mengenai profil negara-negara dengan segala aspek dan kajiannya terutama oleh informasi digital (internet) dan munculnya lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, dll. Pada perkembangannya di kemudian hari, Perbandingan Administrasi sangat terkait dengan lembaga-lembaga semacam ini, karena keterlibatannya dalam bentuk bimbingan teknis atau paling tidak penyediaan data seperti dijelaskan di atas.

Max Weber membedakan antara dua jenis birokrasi dalam tulisannya, yang berkontribusi pada pembentukan administrasi publik dalam bentuk birokrasi (pemerintah) pada awal abad ke-20. Awalnya, ada birokrasi patrimonial yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip konvensional dan tidak membedakan antara kehidupan resmi dan pribadi orang-orang yang bertanggung jawab atas birokrasi. Kedua, birokrasi kontemporer dicirikan oleh spesialisasi hukum dan pembagian yang jelas antara kehidupan pribadi pejabat dan bisnis organisasi. Weber mendefinisikan atribut ideal birokrasi kontemporer, mencirikannya sebagai pendirian berbasis hukum dan logis.

Berdasarkan penelitian milik Haning (2019), reformasi birokrasi merupakan hal yang penting dalam Administrasi Publik. Artikel tersebut menyoroti bahwa reformasi birokrasi dilakukan baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain, dengan fokus pada dua dimensi utama, yaitu dimensi keorganisasian dan dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Di Indonesia, reformasi birokrasi dimulai sejak tahun 1998 dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Administrasi publik adalah bidang yang berkembang dan berorientasi pada prinsip-prinsip manajemen. Menurut beberapa sarjana, peran administrasi publik dalam menjalankan kekuasaan politik adalah mengelola organisasi dan manajemen pemerintah, termasuk proses perumusan kebijakan politik. Bidang administrasi publik melihat pertumbuhan yang cepat di banyak negara, yang telah menyebabkan beberapa perubahan seiring dengan kompleksitas masalah yang dihadapi administrator publik menjadi lebih kompleks. Menganalisis evolusi paradigma administrasi publik melalui identifikasi pola proses manajemen tertentu sangat menarik. Ini akan memungkinkan administrasi publik dioptimalkan dan dibuat lebih efisien.

Ditinjau dari penelitian milik Nuraeni (2020), nilai-nilai etika memiliki peran yang sangat penting dalam administrasi publik, karena menjadi pedoman bagi para administrator publik dalam menjalankan tugas mereka untuk melayani masyarakat. Dengan memegang teguh nilai-nilai etika, seorang administrator publik diharapkan dapat membentuk moral yang baik dan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan integritas dan profesionalisme. Pentingnya etika dalam administrasi publik juga terkait erat dengan pencapaian good governance, di mana melalui penerapan nilai-nilai etika, penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalisir. Selain itu, penelitian tersebut menyoroti bahwa penerapan etika administrasi publik tidak hanya berdampak pada individu-administrator publik itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas dalam rangka mewujudkan good governance. Dengan demikian, artikel tersebut menggarisbawahi pentingnya memegang teguh nilai-nilai etika dalam administrasi publik sebagai landasan untuk mencapai tata kelola yang baik dan

memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain itu, berdasarkan penelitian dari Fauzan (2017), administrasi publik dipandang sebagai seni ilmiah yang memanfaatkan prinsip-prinsip yang telah teruji untuk mengelola proses-proses administratif guna mengatur, melayani, dan melindungi kepentingan umum. Dalam konteks ini, penting bagi administrasi publik untuk memahami realitas yang ada di masyarakat dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, administrasi publik juga harus mampu membangun sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan perannya secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, administrasi publik berperan sebagai pelaksana strategi yang merumuskan dan melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan sumber daya administrasi secara sistematis dan sistemik.

Proses administrasi publik mencakup pelayanan publik sebagai salah satu dimensinya. Bukti seperti ini menunjukkan bagaimana administrasi dan layanan publik terkait erat, seperti dua sisi mata uang. Menyertai ini adalah kelahiran paradigma Layanan Publik Baru, yang menyoroti peran pemerintah sebagai pelayan publik daripada sebagai juara masyarakat dan menandakan ekspansi administrasi publik yang cepat. Agar pemerintah dapat mencapai tujuannya, termasuk memastikan kesejahteraan warganya, pelayanan publik adalah ranah kewajiban yang harus dilakukannya. Dengan demikian semakin baik pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, maka akan berbanding lurus dengan semakin tercapainya *welfare state* tersebut, yang mengindikasikan semakin baiknya administrasi publik sebuah negara. Hal inilah yang menjadikan pentingnya pelayanan publik dalam administrasi publik.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diambil beberapa kesimpulan penting mengenai administrasi publik. Pertama, administrasi publik merupakan bidang yang kompleks dan vital dalam konteks perkembangan global dan teknologi yang dinamis. Interaksi antara berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, hukum, sosiologi, manajemen, dan ekonomi memperkaya pemahaman tentang dinamika kekuasaan dalam pemerintahan, pembentukan kerangka hukum administratif, struktur sosial, serta teknik dan prinsip manajemen.

Kedua, kontribusi dari berbagai disiplin ilmu tersebut memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan administrasi publik, mulai dari pemahaman tentang proses pembuatan keputusan politik, kerangka hukum yang mengatur kegiatan administratif, hingga teknik manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, perubahan global dan Revolusi Industri 4.0 menimbulkan tantangan baru bagi administrasi publik, termasuk integrasi teknologi informasi, manajemen sumber daya manusia yang berkualitas, dan partisipasi masyarakat sebagai kunci dalam menghadapi dinamika perubahan yang cepat.

Keempat, reformasi birokrasi menjadi penting dalam menghadapi tantangan tersebut, dengan upaya menciptakan birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan untuk meningkatkan legitimasi kebijakan. Kelima, globalisasi juga memberikan dampak signifikan pada bidang administrasi publik, yang memerlukan adaptasi terhadap dinamika global untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Terakhir, pelayanan publik menjadi aspek penting dalam administrasi publik, di mana peningkatan kualitas pelayanan publik akan berdampak positif pada *welfare state* dan kesejahteraan masyarakat.

Inisiatif reformasi administrasi akhirnya berasal dari penciptaan paradigma ini untuk administrasi publik. Dengan tujuan meningkatkan kinerja birokrasi di tingkat kelembagaan dan individu yang terlibat dalam penciptaan, penerapan, dan penilaian kebijakan, reformasi administrasi pada dasarnya mencakup tingkat yang sangat luas dan kompleks. Untuk memungkinkan pengembangan dan perubahan organisasi, administrasi publik dan reformasi administrasi oleh karena itu diperlukan. Ini berlaku untuk perubahan kelembagaan (struktural) serta perubahan sistem secara umum.

Mempelajari administrasi publik juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode lain yang disebut perbandingan administrasi publik. Tidak seperti pendekatan Administrasi Konvensional yang bersifat western-oriented, dengan kata lain menekankan pada sistem administrasi di negara-negara Barat yang kebanyakan tergolong negara maju. Memahami New Public Governance tidak bisa lepas dari perkembangan paradigma administrasi publik sebelumnya yang diawali dengan OPA, NPM dan NPS. Paradigma klasik, public management, public service dengan konsep NPG adalah saling melengkapi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2009). Artikulasi Perkembangan Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Baca Universitas Pepabri Makassar*, 3(1), 1–17. <https://www.scribd.com/doc/119148085/Artikulasi-Perkembangan-Administrasi-Publik-Jurnal-BACA-2009>
- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 172–199.
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12.
- Fauzan, H. S. (2017). Filsafat Ilmu Administrasi Sebagai Hakikat dan Makna dalam Keilmuan Administrasi Publik. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 8(1). <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/272%0Ahttps://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/download/272/248>
- Haning, M. T. (2019). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 4(1), 25–37. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v4i1.5902>
- Hendrayady, A., Arman, Djati, S. N., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Razak, M. R. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In *Birokrasi Administrasi*.
- Hidayati, N., Wardhana, I., Gumilar, H., Sianipar, S., & Kartika, D. M. (2008). Perbandingan Administrasi Publik Swedia dan Indonesia (A Comparison of Public Administration in Sweden and Indonesia). In *Jurnal Administrasi Publik (Vol. 5, Issue 2, pp. 179–192)*. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/download/1567/1506>
- Johanes, B. (2018). Ekologi Administrasi Publik di Indonesia dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0: Perspektif Kebijakan Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 53–62.
- Julianti, S. (n.d.). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan NGO, INGO, dan Administrasi Publik. *Academia.Edu*.
- Kusumah, A. (2017). Memahami Administrasi Negara Melalui Perspektif Perbandingan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), 589–596. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/891>
- Nuraeni, S. (2020). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 14(1). <https://revistas.ufjr.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hp/journals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educati>
- Rambe, M. (2022). Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia

- Dalam Penerapan E-Government. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), 232–248
- Salasiah, & Sudiyarti. (2024). Perbandingan Administrasi Publik. In A. N. S. Putro (Ed.), *Tahta Media Group*.
- Wati, R., Wati, W., & Hanifa, S. D. (2023). Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China Dan Rusia. *Pentahelix*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.24853/penta.1.1.63-79>
- Oldes, "Pengertian Gadai", <http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-dan-sifat-gadai.html>, akses pada 08 November 2022.
- Roni, "Arti Kehidupan Manusia", <http://rumahmakna.com/621/arti-kehidupan-manusia/>, akses pada 08 November 2022.
- Syifa Mukrima, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", <http://www.slideshare.net/SyifaMukrimaa/konsep-kepemilikan-dalam-Islam>, akses pada 08 November 2022.
- Wibowo, "Hak Milik", <http://www.jurnalhukum.com/hak-milik/>, akses pada 08 November 2022.